

ABSTRAK

Pulau Terluar yang merupakan sebagai tanda untuk menentukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih belum optimal, dimana salah satu dari 12 pulau kecil terluar yang ada di Indonesia yaitu pulau Sekatung tidak ada sama sekali perhatian dari pemerintah. Pulau tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah pertama, upaya apa yang telah dilakukan pemerintah dalam pengawasan terhadap pulau Sekatung. Kedua, apakah upaya pengawasan tersebut sudah sesuai dengan prinsip dalam pengelolaan wilayah. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mempertimbangkan pertama untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap pulau Sekatung menurut hukum nasional dan hukum internasional. Kedua, sudah sesuai atau belum dengan prinsip pengelolaan wilayah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian ini pertama, upaya pengawasan pemerintah dilakukan sesuai UU Nomor 23 tahun 2014. Kedua, prinsip yang sesuai dengan pengelolaan wilayah pulau kecil prinsip kemitraan, prinsip keterpaduan dan prinsip peran masyarakat. Serta melakukan setiap kegiatan harus dengan prinsip kehati-hatian agar kegiatan pengawasan lebih tertata dengan baik.

Kata kunci : Pengawasan, Pemerintah, Pulau Sekatung

ABSTRACT

The Outermost Islands which are a sign to determine the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia which is still not optimal, where one of the 12 outermost small islands in Indonesia, namely Sekatung Island, has not received any attention from the government. The island has received little attention from the government, both the central government and local governments.

The formulation of the problem in this study is the first, what efforts have been made by the government in monitoring Sekatung Island. Second, is the monitoring effort in accordance with the principles of regional management. The purpose of this study is to consider first to describe the efforts made by the government and local governments in monitoring Sekatung Island according to national law and international law. Second, is it in accordance or not with the principles of regional management. This study uses a type of normative legal research. Furthermore, this research uses legal and contextual approaches.

The results of this study are, first, the monitoring efforts carried out by the government in accordance with Law Number 23 of 2014. Second, the principles that are in accordance with the management of small island areas, the principle of partnership, the principle of integration and the principle of community role. As well as carrying out each activity must be with the precautionary principle so that supervisory activities are more well organized.

Keywords: Supervision, Government, Sekatung Island

DAFTAR ISI

UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PULAU SEKATUNG MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.5. Keaslian Penelitian	5
1.6. Metode Penelitian	6
1.6.1. Jenis Penelitian	6
1.6.2. Pendekatan Penelitian	6
1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	9
BAB II	10
PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH	10
2.1. Pengawasan pemerintah	10
2.1.1. Pengawasan secara administrative	10
2.1.2. Pengawasan secara teknis	14
2.2. Teori Pengelolaan	17
2.3. Konsep Garis Pangkal	24
2.4. Prinsip hukum	26
BAB III	31
UPAYA PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PULAU SEKATUNG	31

3.1. Upaya Pemerintah dalam pengawasan terhadap pulau Sekatung.....	31
4.1. Prinsip Pengelolaan Wilayah berdasarkan aturan Internasional	63
BAB IV	75
PENUTUP	75
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78